

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu komponen penting untuk menilai perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah pola pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga terhadap barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya serta berbagai jenis pelayanan. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya merupakan barang-barang konsumsi. Apabila pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. (Persaulian, 2013)

Menurut Keynes, faktor utama yang menentukan prestasi ekonomi suatu negara adalah pengeluaran perkapita/agregat yang merupakan pembelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Keputusan konsumsi rumah tangga mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek fluktuasi konsumsi memiliki pengaruh signifikan terhadap fluktuasi ekonomi dan dalam jangka panjang keputusan konsumsi rumah tangga akan berpengaruh pada variabel makro ekonomi lainnya. Di kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 50-75% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya dimana konsumsi individu berbanding lurus dengan pendapatannya. (Persaulian, 2013)

Badan Pusat Statistik Kota Malang mencatat adanya perubahan pola konsumsi Masyarakat Kota Malang. Pada tahun 2018 rata-rata nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga tiap bulan di Kota Malang mencapai angka Rp 8.000.000 angka tersebut naik jika dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp 5.000.000 per bulan. Konsumsi Masyarakat Sebagian besar dikeluarkan untuk beberapa komoditas seperti ikan, sereal, popok, *skincare*, aksesoris telepon seluler, dan tarif kendaraan online. (BPS Malang Kota, 2018)

Pola konsumsi Masyarakat merupakan indikator dalam menentukan pengeluaran perkapita masyarakat, hal ini tentunya menjadi tolak ukur tingkat daya beli yang mampu diraih oleh penduduk dalam daerah tersebut. Maka dari itu indikator kesejahteraan berperan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar tercipta wilayah yang sejahtera dan kondusif. Indikator kesejahteraan sesuai fokus peneliti adalah tingkat daya beli, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan pertumbuhan penduduk terhadap pengeluaran perkapita masyarakat Kota Malang. (Setianingsih et al., 2019)

Salah satu wilayah di Jawa Timur tujuan peneliti adalah Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur. Terdapat potensi alam dan iklim Kota Malang yang terletak di tengah–tengah wilayah Kabupaten Malang, secara astronomis terletak pada posisi  $112.06^{\circ}$  -  $112.07^{\circ}$  Bujur Timur,  $7.06^{\circ}$  -  $8.02^{\circ}$  Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sebesar  $110,06 \text{ km}^2$  terbagi dalam lima kecamatan yaitu: Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru yang terbagi dalam 57 kelurahan. Jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 557 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 4.286. (BPS Malang Kota, 2021)

Perencanaan pembangunan merupakan awal dari proses pembangunan yang memerlukan sasaran waktu yang jelas. Hal ini disebabkan oleh prioritas pembangunan yang mendesak untuk diaktualisasi, sehingga perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari

satuan pemerintahan terendah hingga ke pemerintah daerah. Upaya-upaya pencegahan dini dimulai dari proses direncanaan, sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana secara maksimal dan tepat waktu. Pertimbangan mengenai persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat diharapkan cepat teratasi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. (Setianingsih et al., 2019)

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola suatu daerah dengan memperhatikan kebutuhan data mendetail tentang kondisi daerah yang meningkat maupun yang mengalami penurunan. Data yang diperoleh digunakan sebagai acuan evaluasi guna mengetahui hasil pembangunan, serta sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan pembangunan (Kahar, 2018).

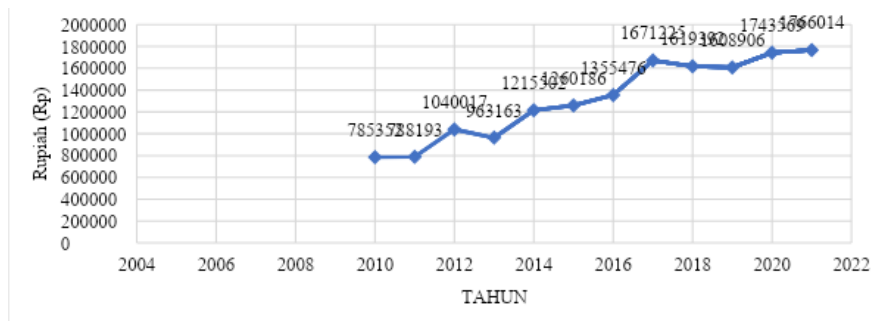
Salah satu daerah yang memiliki permasalahan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian Aziz, Supriyono dan Muluk (2013) menyatakan bahwa Kota Malang belum holistik dalam proses perencanaan pembangunan, karena belum menjawab kebutuhan masyarakat, belum mempunyai alur perencanaan yang jelas dan tepat sebagaimana mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RKPD. Selain itu, Aziz, Supriyono dan Muluk (2013) menambahkan, proses perencanaan pembangunan daerah Kota Malang bersifat terlalu hierarkis dan belum dapat mengangkat isu-isu strategis yang muncul di masyarakat. Beberapa bentuk riil hal mendasar dari permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Malang adalah permasalahan mengenai tingkat pengeluaran perkapita masyarakat Kota Malang yang tentunya akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu sebagai indikator kesejahteraan sesuai fokus peneliti adalah tingkat daya beli, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan pertumbuhan penduduk terhadap rata-rata pengeluaran perkapita

sebulan masyarakat Kota Malang yang juga berpengaruh nyata dalam suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial dalam artian lain dari kualitas hidup manusia sebagai nilai dari suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar.

Pengeluaran perkapita digunakan untuk mengukur standar hidup manusia. Hal ini di pengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga menghasilkan output yang dapat berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan yang ada menciptakan pengeluaran atau konsumsi. Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang di gunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah. (Yunita:2012).

**Grafik 1.1**

**Pertumbuhan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Malang**



Sumber : <https://malangkota.bps.go.id>

Terlihat pada grafik 1.1 bahwa pengeluaran perkapita Kota Malang naik seiring tahun ke tahun. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat daya beli masyarakat yang tinggi,. Setelah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, perbaikan perekonomian mulai terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur namun dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Pada tahun 2021, lima daerah kabupaten/kota di Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Madiun yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,73

persen; diikuti Kabupaten Pasuruan sebesar 4,34 persen; Kota Surabaya sebesar 4,29 persen; Kota Blitar sebesar 4,28 persen; diikuti Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo masing-masing sebesar 4,21% (persen). (BPS Jatim, 2021)

Melejitnya perbaikan ekonomi Malang Kota pada 2021 merupakan salah satu perubahan signifikan setelah melemahnya ekonomi pada saat pandemi pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2020, sedangkan ekonomi Kota Malang tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 meningkat sebesar 4,21% (persen). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 8,21% (persen). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT yang tumbuh sebesar 13,03% (persen) (BPS Malang Kota, 2021). Berikut adalah presentase pertumbuhan Kota Malang melalui perhitungan PDRB dalam 5 (lima) Tahun terakhir :



*Gambar 1.1*

**Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang  
Tahun 2017-2021**

Sumber : <https://malangkota.bps.go.id>

Fungsi penting pertumbuhan ekonomi ialah mencerminkan keadaan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi akan menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) yang diperoleh. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan kenaikan PDRB yang diperoleh suatu negara. (Sadono, Sukirno. 2010)

Terlihat pada gambar 1 bahwa tahun 2020 terdapat kelesuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi yang lesu memungkinkan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan situasi politik yang tidak kondusif akibatnya kegiatan-kegiatan ekonomi menjadi menurun termasuk kegiatan produksi maupun investasi. Kondisi ekonomi suatu daerah yang tidak stabil akan mempengaruhi nilai tukar negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga dapat memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. (Jumlah et al., 2015)

Berdasarkan rilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang mencatat angka inflasi di Kota Malang mengalami peningkatan pada bulan April 2022 ini. Kenaikan angka inflasi ini cukup signifikan dari 0,63 % (persen) pada bulan Maret 2022 menjadi 1,44 % (persen) di Bulan April. Adanya kenaikan angka inflasi yang cukup tinggi dan tetap terkendali menandakan meningkatnya daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Adanya peningkatan daya beli masyarakat di Kota Malang merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah Kota Malang dalam upaya membangun kualitas hidup warga Kota Malang.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi

perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. (BPS Malang Kota, 2020)

**Grafik 1.2**



**Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Malang  
Tahun 2010-2021**

Sumber : <https://malangkota.bps.go.id>

Terlihat dalam grafik 1.2 indeks pembangunan manusia di Kota Malang kontinu mengalami kemajuan atau adanya gejala trend kenaikan selama periode 2010-2021. Dari 76,69 (2010) meningkat menjadi 82,04 (2021) atau selama periode tersebut tumbuh 6,5 % (persen) dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2010-2021 sebesar 0,83 % (persen) per tahun. Kontinuitas pembangunan manusia di Kota Malang menunjukkan keberhasilan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kedepan, pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan IPM Kota Malang, agar tetap berada pada kategori IPM “sangat tinggi”.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. (BPS Malang Kota, 2020)

IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 82,22, sebagaimana posisi tahun sebelumnya. Surabaya bersama Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah dengan IPM berkategori “sangat tinggi”. Daerah dengan kategori IPM “tinggi” sebanyak 20 kabupaten/kota, sedangkan yang berkategori “sedang” sebanyak 14 kabupaten/kota.

Kota Surabaya tercatat mempunyai UHH terbaik sebesar 74,13 tahun. Sarana dan prasarana kesehatan di Surabaya relatif lengkap, dan masyarakatnya dengan mudah memanfaatkan akses sarana dan prasarana kesehatan. Di samping itu, kesadaran masyarakat Surabaya untuk berpola hidup sehat cukup tinggi, sehingga mendukung meningkatnya usia harapan hidup. UHH terendah masih tercatat di Bondowoso atau sebesar 66,55 tahun. Walaupun demikian capaian UHH tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,28 dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Bondowoso juga semakin membaik.

Kota Malang mempunyai HLS tertinggi sebesar 15,41 tahun, dan terendah tercatat di Bangkalan sebesar 11,59 tahun, sedangkan RLS tertinggi tercatat di Kota Madiun sebesar 11,13 tahun dan yang terendah masih dipegang Sampang dengan RLS sebesar 4,55 tahun. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan tahun 2019 tertinggi tercatat di Surabaya atau sebesar Rp. 17,85 juta, diikuti Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Sidoarjo masing-masing Rp. 16,67 juta, Rp.



16,04 juta dan Rp. 14,61 juta. Sementara, terendah tercatat di Bangkalan atau sebesar Rp. 8,72 juta.

Berdasarkan data IPM tahun 2018 hingga 2019 menunjukkan Kota Malang mendukung upaya pembangunan dasar guna mencapai dimensi standar hidup layak (BPS Malang Kota, 2019).

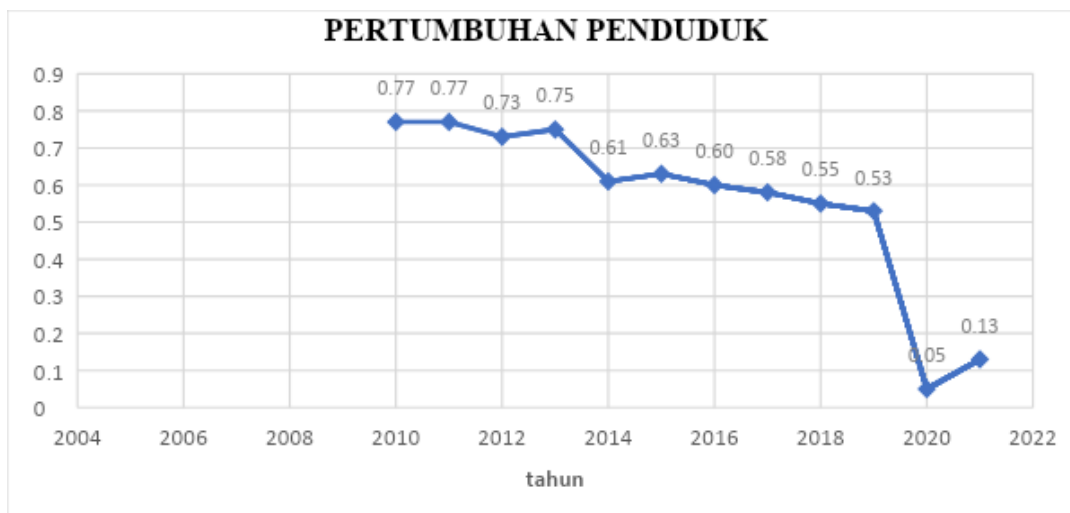
Pembangunan manusia salah satunya diwakilkan oleh kualitas hidup manusia melalui dimensi standar hidup layak yang dapat direpresentasikan melalui daya beli atau PPP (*Purchasing Power Parity*) serta tingkat pengeluaran perkapita masyarakat. (BPS Malang Kota, 2020).

Maka dari itu Pemerintah Kota Malang harus berupaya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui pencegahan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Secara Umum salah satu penyebab timbulnya ketidakmerataan distribusi pendapatan, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan perkapita, inflasi dimana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertumbuhan produksi barang-barang, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), rendahnya mobilitas sosial, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri dan Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara yang masih berkembang dalam perdagangan dengan negara yang maju. (Arsyad, 2010)

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, merilis hasil Sensus Penduduk 2020 di Kota Malang. Jumlah penduduk dari hasil sensus per September 2020, tercatat sebanyak [843.810](#) jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kota Malang mulai 2010 hingga 2020 mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,27% (persen) pertahunnya. Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar.

Hasil sensus ini mencatat mayoritas penduduk Kota Malang didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 26% (persen) dari total populasi, tepatnya sebanyak 213,8 ribu jiwa dan generasi milenial sebanyak 25% (persen) dari total populasi Kota Malang, atau sebanyak 211,8 ribu jiwa. Generasi Z dan generasi milenial merupakan generasi penduduk ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi. (BPS Kota Malang, 2021)

**Grafik 1.3**



**Grafik Pertumbuhan Penduduk di Kota Malang  
Tahun 2010-2021**

Sumber : <https://malangkota.bps.go.id>

Terlihat dalam grafik 1.3 terjadi penurunan yang sangat signifikan terhitung dari tahun 2010 hingga 2021. berdasarkan data dari BPS, laju pertumbuhan penduduk per tahun sejak tahun 2020 juga mengalami penurunan. Sejak tahun 2020 hingga 2022, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Terutama pada tahun 2020 yang pada saat itu terindikasi adanya pandemi COVID-19. Adanya ketimpangan pendapatan sebagai dampak pandemi

mengakibatkan penurunan signifikan hingga kemudian sedikit kembali naik pada tahun 2021 saat pandemic perlahan berakhir.

Namun apabila dilihat dari segi demografis, penurunan laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu hal positif untuk menekan jumlah populasi guna mengatur kepadatan penduduk agar bisa dikendalikan yang kemudian dapat menciptakan peluang untuk menghadirkan situasi sosial ekonomi yang lebih baik salah satunya seperti peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat yang dapat meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang seiring menurun (Arsyad, 2010).

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk (BPS, 2022).

Menilik ulang pada grafik 1.1 menunjukkan pada tahun 2021 rata – rata pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Kota Malang mencapai Rp 1.766.014 per tahun, naik sebesar 55% (persen) dibanding tahun 2010. Selama periode 2010-2021 rata – rata peningkatan pengeluaran

perkapita sebulan masyarakat Kota Malang berada dalam angka 7,91 % (persen) per tahun. Peningkatan pengeluaran per kapita ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Kota Malang semakin membaik. Kondisi ini sejalan dengan makro ekonomi yang ditunjukkan dari angka produk domestik regional bruto (output wilayah) yang juga mengalami kenaikan selama periode tersebut. Di samping itu, harga-harga barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok cukup terjaga inflasinya selama tahun 2021. Stabilitasnya inflasi tersebut menguatkan daya beli masyarakat Kota Malang, sehingga roda ekonomi berputar cukup dinamis (BPS Malang Kota, 2022).

Adanya kontribusi beberapa variabel seperti indeks daya beli, IPM, serta pertumbuhan penduduk terhadap rata-rata pengeluaran perkapita sebulan masyarakat kota malang yang tentunya dapat menjelaskan keadaan ekonomi penduduk Kota Malang dalam 12 tahun terakhir. Maka berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji masalah mengenai **“Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Malang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah daya beli Masyarakat berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita Masyarakat Kota Malang?
- b. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita Masyarakat Kota Malang?
- c. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pengeluaran per kapita pada Kota Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh daya beli masyarakat terhadap pengeluaran per kapita pada Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh IPM terhadap pengeluaran per kapita pada Kota Malang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pengeluaran per kapita pada Kota Malang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kota Malang dapat dikatakan sejahtera.

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian tetap terarah pada permasalahan, maka diperlukan adanya Batasan ruang lingkup penelitian, yaitu :

1. Penelitian mencakup data series selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia
2. Variabel yang digunakan oleh peneliti antara lain daya beli sebagai X1, IPM sebagai X2, dan pertumbuhan penduduk sebagai X3.
3. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat batasan seperti yang telah dijelaskan dalam tujuan ini. Sehingga Peneliti lebih fokus pada pengaruh daya beli, IPM, dan pertumbuhan penduduk terhadap rata – rata pengeluaran per kapita sebulan masyarakat yang terdapat di Kota Malang.

## 1.5 Manfaat

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

### 1. Bagi peneliti

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu membantu peneliti dalam mendapatkan gelar S1 Ekonomi Pembangunan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

### 2. Bagi instansi pemerintah

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat membantu memberikan ide pikir bagi pemerintah Kota Malang guna meningkatkan pengeluaran per kapita demi mendapatkan gambaran masyarakat Kota Malang yang sejahtera.

### 3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan sumbangsih informasi bagi para mahasiswa yang lain di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.